



DBH Dibayar Bertahap, Pemprov Alokasi Rp2,3 T

DBH Dibayar Bertahap, Pemprov Alokasi Rp2,3 T

REPORTER MUHAMMAD MUHTASIM
EDITOR ILHAM WASI

MAKASSAR, FAJAR—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencicil utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban fiskal daerah.

DIKETAHUI, Pemprov Sulsel memiliki utang DBH tahun 2024 sebesar Rp972 miliar yang belum tersalurkan selama enam bulan. Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota serentak menyampaikan keluhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka

menjadi tidak teratur, sehingga alokasi program kegiatan dan penggajian pegawai terganggu. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, bahkan sempat mengeluhkan DBH yang tidak kunjung tersalurkan.

•• Baca DBH... Hlm 11



DBH Dibayar Bertahap, Pemprov Alokasi Rp2,3 T

•• Lanjutan Halaman... 9

Padahal, Kota Makassar merupakan penerima DBH terbesar dari Pemprov Sulsel. Danny bahkan menyampaikan rencana pemangkasan 7.000 pegawai Laskar Pelangi di Pemkot Makassar sebagai imbas dari

belum cairnya DBH.

Untuk menuntaskan utang tersebut, Pemprov telah mengalokasikan anggaran DBH tahun 2024 dan 2025. "Untuk alokasi DBH tahun ini, informasi dari Kepala BKAD adalah Rp2,3 triliun telah disiapkan untuk dana bagi hasil,"

ujar Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadry Djufry, kemarin.

Pemprov Sulsel berkomitmen untuk menuntaskan pembayaran DBH, termasuk utang tahun sebelumnya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun demikian, Prof Fadry meny-

ebutkan, tidak dapat dipastikan semua utang akan terlunasi tahun ini.

"Kemungkinan tidak bisa selesai tahun ini semuanya, banyak yang harus dicover. Karena kan ini DBH nanti masuk (dana) lagi baru dikeluarkan, kan. Kalau tidak ada yang masuk, tidak

ada yang bisa dibagi lagi," tuturnya.

Ia menyebut, anggaran pembayaran DBH tahun 2025 sudah mendapatkan alokasi. Sementara utang salur 2024 dicicil secara bertahap.

"Mungkin ada di 2026 akan diselesaikan. Tapi DBH 2025 ini kita sudah anggaran Rp2,3 triliun untuk diselesaikan," imbuhnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Salehuddin, mengatakan bahwa anggaran Rp2,3 triliun tersebut merupakan akumulasi dari utang

proyeksi pembayaran tahun ini. Ia juga menyebutkan bahwa hingga bulan Januari, beberapa daerah sudah menerima pembayaran. Hanya saja, dia belum menyebutkan daerah-daerah yang dibayar.

"Sudah ada beberapa daerah yang menerima pembayaran (utang) tahun 2024. Saat ini, baru sembilan daerah yang menerima untuk satu bulan, dimulai dari satu bulan terlebih dahulu. Makassar belum," terangnya, Senin, 3 Februari.

Selain DBH, Pemprov Sulsel juga menganggar-

kan pembayaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepesertaan kesehatan gratis. Anggaran PBI di 2024 dialokasikan untuk membayar utang PBI 2023 Triwulan III dan IV sebesar Rp116,443 miliar, sementara untuk anggaran PBI 2024 dialokasikan di tahun 2025 sebesar Rp325,279 miliar, untuk Triwulan I - IV 2024 dan Triwulan I - II 2025 atau enam Triwulan. "PBI belum (dibayarkan), masih sementara review di Inspektorat, sudah ada dianggarkan enam triwulan," ungkap Bobby, sapaannya. (*//)